

**ANALISIS DISTRIBUSI BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
PADA BANK RIAUKEPRI CABANG SYARIAH PEKANBARU DALAM  
PERSPEKTIF PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
(PSAK) NO 105**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah  
(SE,Sy) Pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU



Oleh :

**Z A I N A L**

**(NIM:10825003681)**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2013**

## ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah: **”Analisis Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru Dalam Perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 105”**.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh, adanya Pembiayaan *Mudharabah* yang merupakan salah satu produk perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan ini membutuhkan metode distribusi bagi hasil yang saling menguntungkan dan harus disesuaikan dengan peraturan perbankan juga dengan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur. PSAK No 105 mulai diberlakukan secara efektif di Indonesia tanggal 1 Januari 2008, walaupun demikian, sistem yang dianut oleh bank syariah belum konsisten dengan jiwa syariah. Karena, pada faktanya pihak perbankan syariah masih menggunakan metode *revenue sharing* dalam bagi hasilnya, padahal di dalam PSAK No 105 sudah jelas bahwasanya prinsip distribusi bagi hasil yang diakui yaitu *gross profit margin* dan *profit sharing*. Juga permasalahan distribusi bagi hasil yang selama ini masih mengacu pada sistem proyeksi hasil usaha belum berdasarkan hasil ril usaha.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Bank Riau Kepri Cabang Syariah Jl. Sudirman No. 628 Pekanbaru. Penulis memilih Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru ini dikarenakan sektor perbankan ini sangat potensial dalam membantu membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik dikalangan masyarakat ekonomi menengah melalui konsumsi maupun investasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dan untuk mengetahui Bagaimana penerapan distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan ketentuan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No 105.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik

pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan analisis deskriptif,

Hasil dari penelitian ini Penulis menemukan adanya perbedaan penerapan pola bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan ketentuan PSAK No 105. pada paragraf 11 dasar prinsip bagi hasil adalah *laba bruto (gross profit)* dan *laba neto (profit sharing)* sedangkan yang diterapkan oleh Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru adalah *Revenue sharing*. PSAK No 105 paragraf 22 tentang pengakuan penghasilan dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana, tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha, sedangkan Bank RiauKepri Cabang Syariah menerapkan metode proyeksi hasil usaha. Namun penulis juga menemukan adanya kesesuaian antara implementasi pada Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan ketentuan PSAK No 105. Hal ini dari sisi pengakuan kerugian, penyajian dan pengelolaan dana. Bank RiauKepri Cabang Pekanbaru telah mengacu kepada PSAK No.105.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjukNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru Dalam Perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 105”**. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, keluarga sahabat serta pengikutnya yang telah memberikan jalan penerang sampai akhir jaman.

Skripsi ini merupakan karya tulis yang disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan dorongan moril maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepantasnya apabila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Teristimewa untuk ayahanda (Ilyas) dan Ibunda (Zaleha) yang senantiasa mendo'akan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H.M Nazir MA. Beserta para pembantu Rektor I,II dan III yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu diuniversitas ini.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Dr. Akbarizan M.Ag M.Pd beserta pembantu Dekan I,II dan III yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Bapak Mawardi M Ag beserta Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Darmawan Tia Indrajaya.
5. Drs. KASTULANI SH. M Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I, terima kasih atas segala bimbingan dan saran-sarannya.
6. Pimpinan dan staf Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian.

7. Bapak dan Ibu, terima kasih atas segala dorongan do'a dan financialnya selama ini.
8. Teman-teman Emil Salim, Muliyadi dan Saerizal terima kasih atas bantuan moril maupun materil jua dukungannya selama ini.
9. Semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis berharap semoga amal baik yang telah mereka lakukan mendapat ridha dan balasan dari Allah SWT. Amin. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong bagi dunia pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

*Wasalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, 28 Januari 2013

Penulis



## DAFTAR ISI

Hal

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK .....i**

**KATA PENGANTAR.....iii**

**DAFTAR ISI.....v**

**DAFTAR TABEL .....viii**

**DAFTAR GAMBAR.....ix**

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

A.Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Batasan Masalah .....7

C. Rumusan Masalah .....7

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....7

E. Metode Penelitian .....9

F. Sistematika Penulisan.....12

**BAB II Gambaran Umum Bank RiauKepri Cabang Pekanbaru .....13**

A.Sejarah Berdirinya ..... 13

B. Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru..... 16

C.Struktur Organisasi, Tugas Dan Wewenang PT. Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru .....	17
D.Aktivitas PT. Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru.....	25
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TEORI BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH.....</b>	<b>31</b>
A. BAGI HASIL.....	31
1. Pengertian Bagi Hasil .....	31
2. Teori Distribusi Bagi Hasil .....	32
3. Investasi Berdasarkan Bagi Hasil .....	33
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil .....	34
B. MUDHARABAH .....	35
1.Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	35
2. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i> .....	37
3. Rukun Dan Syarat Mudharabah.....	40
4. Jenis-Jenis Mudharabah.....	43
5. Teknik mudharabah dalam perbankan.....	44
6. Komponen Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah .....	45
7. Metode Distribusi Bagi Hasil Dalam Mudharabah.....	46



<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A.Metode Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru .....	52
B.Penerapan Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan ketentuan PSAK No 105 .....	58
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
A.Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>vi</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 4. 1 :Contoh Metode Bagi Hasil PSAK No 59 .....	80
Tabel 4. 2 :Contoh Metode Bagi Hasil PSAK No 105 .....	91
Tabel 4.3:Perbandingan Kesesuaian Implementasi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dengan Ketentuan PSAK No 105 .....	93

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2. 1 : Struktur Organisasi Bank RiauKepri Cabang Syariah pekanbaru .....	20
Gambar 2. 2 : Skema Mudharabah.....	46
Gambar 2. 3 : Perbedaan prinsip Bagi hasil .....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi Islam saat ini cukup pesat, hal ini ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah, terutama pada industri perbankan yang saat ini hampir semua perbankan konvensional baik swasta nasional maupun internasional ikut serta mengambil bagian dalam membuka pelayanan dan produk berbasis syariah. Hal ini dipicu karena regulasi dalam Undang-undang perbankan No 21 tahun 2008 di mana perbankan dibolehkan membuka layanan dual banking sistem, sehingga bank-bank konvensional mulai melirik dan membuka unit usaha syariah.

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting. Berdirinya bank syariah membawa andil yang sangat baik dalam sistem keuangan di Indonesia. Peranan ini sebagai upaya dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karena itu, keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat Muslim.

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali kemasyarakat guna memenuhi kebutuhan dana pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif.<sup>1</sup> Selain itu juga ada jasa-jasa perbankan lain yang disediakan oleh bank syariah. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana,

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Graindo Persada, 2002) h. 2.

bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam rangka penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan karena dari situlah perbankan dapat bertahan hidup dan berkembang. Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan.

Salah satu keunikan produk perbankan syariah adalah adanya fasilitas pembiayaan dengan pola bagi hasil. Pola pembiayaan ini salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pengkongsian yang salah satu pihak bertindak menyediakan dananya (*shahibul maal*), sedangkan yang lainnya menyediakan keahlian dan bertindak sebagai (*mudharib*). Dengan posisi demikian, *shahibul maal* bukan bertindak sebagai pihak yang meminjamkan dana, melainkan sebagai investor yang menyerahkan dananya untuk tujuan yang produktif. Sebaliknya *mudharib* akan bertindak sebagai *fund manager* bukan sebagai *debitor*. Hubungan yang terjalin antara keduanya merupakan hubungan kemitraan dan bersifat kerja sama, bukan layaknya hubungan yang terjadi dalam transaksi pinjam-meminjam. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi dua berdasarkan proporsi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika terjadi kerugian, maka *shahibul maal* yang mendapatkan kerugian, dan pengelola kehilangan tenaga dan waktunya.<sup>2</sup>

Mudharabah adalah meleburnya badan (tenaga) disatu pihak dengan harta dari pihak lain. Artinya, satu pihak bekerja, sedangkan pihak yang lain

---

<sup>2</sup>Zainul, Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alfabet, 2000), h. 10.

menyerahkan harta. Kedua belah pihak kemudian sepakat mengenai prosentase tertentu dari hasil keuntungan yang diperoleh, semisal  $\frac{1}{3}$  (33,3%) dari laba atau  $\frac{1}{2}$  (50%) dari hasil keuntungan. Contoh: satu pihak menginvestasikan modal sebesar 1.000, sedangkan pihak lain mengelola modal tersebut, kemudian hasil keuntungannya dibagi oleh kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Pada pembiayaan *mudharabah* diterapkan keadilan, kejujuran dan transparansi dari kedua belah pihak. Hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya sebagai debitor dengan kreditor saja, tetapi hubungan keduanya diakui sebagai mitra kerja yang lebih dekat dan lebih humanis. Adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam peraturan pemerintah adalah prinsip muamalah berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha bank. Nilai tambah itulah yang mengakibatkan bank syariah semakin diminati oleh masyarakat.

Pembiayaan *mudharabah* membutuhkan kerangka distribusi bagi hasil yang adil dan saling menguntungkan. Pada saat akad penyaluran pembiayaan *mudharabah* harus terdapat kepastian mengenai persentase perolehan hasil dari keuntungan usaha yang dibiayai. Bank harus menetapkan mekanisme perhitungan distribusi yang jelas tentang persentase bagi hasilL keuntungan usaha yang kesemuanya lebih merupakan kebijakan bisnis bank yang bersangkutan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berbeda dari tiap-tiap bank syariah. Besarnya keuntungan yang dibagikan kepada masing-masing pihak tergantung dari kesepakatan pada saat transaksi atau akad dilaksanakan.

---

<sup>3</sup>Taqiyuddin An-Nabhani. *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2004) Cet. Ke- VI h. 102-103.

Pada penerapan sistem syariah, tentu mempunyai sistem distribusi bagi hasil yang berbeda dengan perlakuan bank konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran distribusi bagi hasil, terutama pembiayaan *mudharabah* harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Dengan terbitnya PSAK No 105 tentang distribusi bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Perbankan Syariah yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, telah membawa era baru bagi industri keuangan di tanah air yang berprinsip syariah. PSAK No 105 telah menjadi peraturan dan standar yang baku bagi operasional perbankan syariah di Indonesia sehingga dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan dan perbankan syariah. Walaupun demikian, PSAK No 105 tersebut dinilai sistem yang dianut masih belum konsisten dengan jiwa syariah karena pada faktanya di lapangan pihak perbankan syariah masih banyak yang menggunakan metode *revenue sharing* dalam bagi hasilnya, padahal di dalam PSAK No 105 sudah jelas bahwasanya prinsip pembagian distribusi bagi hasil yang diakui ada dua jenis prinsip bagi hasil yaitu harus menggunakan *gross profit margin* dan *profit sharing*. Permasalahan distribusi bagi hasil yang selama ini pada perbankan syariah masih mengacu pada sistem proyeksi hasil usaha belum berdasarkan hasil riil usaha.

Seperti telah diketahui, bahwa PSAK No 105 efektif diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2007 dan mulai diberlakukan secara efektif di Indonesia tanggal 1 Januari 2008. Adapun keberadaan bank syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992. Pada masa sebelum terbitnya PSAK No 105 sebagai standar distribusi bagi hasil yang baku bagi bank syariah yang menggunakan sistem *revenue sharing*.

Pembiayaan *Mudharabah*, yang merupakan salah satu produk perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil, bisa dimungkinkan pula telah mengalami perubahan perlakuan distribusi bagi hasil akibat diberlakukannya PSAK No 105 Tahun 2008 tentang distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah.

Penulis memilih Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru sebagai studi kasus dalam penelitian ini dikarenakan sektor perbankan ini sangat potensial dalam membantu membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik dikalangan masyarakat ekonomi menengah melalui konsumsi maupun investasi. Produk-produk yang ditawarkan Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru ini dapat diterima disemua kalangan masyarakat. Keunggulan inilah yang dimiliki oleh Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru. Untuk memenuhi kebutuhan kredit bagi para pengusaha dan pedagang kecil yang kekurangan modal, tentunya harus memenuhi kriteria mudah dan tepat waktu, sehingga Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru tersebut memiliki keunggulan komparatif dari jenis perbankan yang lain. Dalam memberikan kredit kepada masyarakat haruslah mudah dalam mendapatkannya dan murah. Dalam arti lain bagi hasil yang terjangkau dan biaya-biaya yang terjangkau, karena dikalangan masyarakat menengah ke bawah kekurangan atas modal merupakan suatu permasalahan yang sering dialami. Oleh karena itu perolehan modal yang mudah merupakan keinginan dari para pengusaha.



Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru yang terletak di Jl. Sudirman No. 628 Pekanbaru. Bank RiauKepri Cabang Syari'ah Pekanbaru ini telah lama berdiri dan telah banyak melakukan penyaluran dana ke masyarakat dan menghimpun dana dari masyarakat. Sebagai lembaga perbankan, Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara dua pihak (*financial intermediary*), yakni pihak kelebihan dana dan pihak kekurangan dana.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan sebuah karakteristik dari suatu perbankan syariah dan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada kaidah *mudharabah*, dengan hal ini bank syariah akan bertindak sebagai mitra antara orang yang memiliki kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana, dengan penabung bank akan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sementara penabung akan bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah*, yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak yang terkait. Kebijakan yang ada pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dalam melakukan distribusi menggunakan metode *revenue sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana, apabila bank menggunakan metode perhitungan bagi hasil berdasarkan *revenue Sharing* yang berarti dimana bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya pengelolaan dana, maka akan ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini menjadi obyek penelitian terhadap implementasi distribusi bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan oleh BankRiau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru. Apakah pola distribusi bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan telah sesuai dengan PSAK No 105. Untuk itu dalam penelitian ini penulis memilih judul “ANALISIS DISTRIBUSI BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK RIAUKEPRI CABANG SYARIAH PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF PERYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO 105”.

#### **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih fokus kepembahasan, maka penelitian ini dibatasi hanya pada pola distribusi bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang ingin dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru?
2. Bagaimana Penerapan distribusi bagi hasil pembiayaan *mudharabah* diBank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan ketentuan PSAK No 105?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui metode perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan ketentuan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No 105.

### **2. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini berguna secara teoritis maupun praktis, adapun kegunaannya adalah:

1. Salah satu sumber informasi bagi pihak-pihak yang terkait terutama lembaga Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru.
2. Untuk memberikan kontribusi pengetahuan secara ilmiah khususnya teori bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah.
3. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang aplikasi metode disibusi bagi hasil pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan bank.
4. Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy.)

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru Jl. Sudirman No. 628 Pekanbaru. Penulis memilih Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru sebagai studi kasus dalam penelitian ini dikarenakan sektor perbankan ini sangat potensial dalam membantu membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik dikalangan masyarakat ekonomi menengah melalui konsumsi maupun investasi. Produk-produk yang ditawarkan Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru ini dapat diterima disemua kalangan masyarakat.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun subjek dari penelitian ini adalah karyawan bagian pembiayaan, sedangkan objek penelitian ini adalah distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dalam perspektif pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No 105.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang diteliti.<sup>4</sup> Populasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah berjumlah 40 orang kariawan Bank RiauKepri Syariah Cabang Pekanbaru.

---

<sup>4</sup>Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1995), h. 109.

Sampel adalah bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi yang diteliti secara rinci.<sup>5</sup> Semakin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan sebaliknya semakin kecil jumlah sampel menjauhi populasi maka semakin besar kesalahan generalisasi.<sup>6</sup> Dalam menetapkan jumlah sampel, teknik yang digunakan penulis adalah metode atau teknik *purposive sampling*, yaitu peneliti menetapkan sendiri jumlah sampel dalam penelitian. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan berjumlah 7 orang kariawan Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan sebagai dasar penelitian, dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya:

- a. Observasi merupakan pengamatan secara langsung kepada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru
- b. Wawancara dilakukan guna mendapatkan data langsung dilapangan tentang gambaran aplikasi distribusi bagi hasil pembiayaan Mudharabah pada objek penelitian terkait
- c. Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data-data berupa dokumentasi perusahaan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Yogyakarta: UPFE UMY, 2005), h. 95.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfa Beta, 1998), h. 63.

<sup>7</sup> Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-4, h. 108.

## 5. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data-data yang telah terkumpul termasuk dalam data kualitatif, yaitu serangkaian observasi dimana tiap observasi yang terdapat dalam sampel (populasi) tergolong pada salah satu dari kelas-kelas yang eksklusif secara bersama-sama (mutually exclusive) dan yang kemungkinannya tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka.

Dalam buku lain disebutkan tentang jenis data yang dikumpulkan, dan data-data yang terkumpul dalam penelitian ini merupakan data-data Primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data,<sup>8</sup> dan Data sekunder (data tangan ke dua) adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya, data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.<sup>9</sup> Data tersebut berupa teknik implementasi bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan landasan hukum syariah, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 105 tentang sistem distribusi Hasil Usaha dalam lembaga Keuangan Syariah.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder akan disajikan dalam uraian yang sesuai dengan hasil penelitaian, metode yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. Ke-12, h. 402.

<sup>9</sup> Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005 ), Cet. Ke-1, h. 9.

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 9.

Didalam penelitian ini metode tersebut dipakai untuk menganalisa data yang berasal dari pihak Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan PSAK No 105.

#### **F. Sistematika Penulisan Laporan**

Penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru Dalam Perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 105” ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pada bagian ini penulis juga mengungkapkan Metode penelitian, baik desain, jenis data dan variabel serta teknik pengumpulan data.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menggambarkan secara umum mengenai perusahaan tempat objek penulisan meliputi sejarah perusahaan, visi misi dan struktur perusahaan.

#### **BAB III TINJAUAN UMUM TEORI DISTRIBUSI BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH**

Bab ini terdiri dari : pengertian bagi hasil, Teori Bagi Hasil, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil, Pengertian mudharabah, landasan syari'ah mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, jenis-jenis mudharabah, Teknik mudharabah dalam perbankan, Manfaat mudharabah, dan Metode distribusi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini penulis menjawab rumusan masalah dari data yang diperoleh saat melakukan penelitian, yaitu: metode perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru, Penerapan distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah di Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan ketentuan PSAK No 105

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini terdiri dari : kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis kemudian diberikan saran-saran yang berkaitan dengan tema penelitian.



**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM BANK RIAUKEPRI CABANG SYARIAH**  
**PEKANBARU**

**A. Sejarah Berdirinya**

Beroprasinya Bank RiauKepri Cabang Syari'ah Pekanbaru tidak hanya dilandasi dengan adanya fakta bunga bank haram pada akhir tahun 2003 dari Majelis Ulama Indonesia, namun juga disokong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memungkinkan diimplementasikannya Bank RiauKepri Cabang Syari'ah Pekanbaru adalah dari sisi regulasi dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan peluang bagi bank umum konvensional untuk ikut serta menangani transaksi perbankan syari'ah.

Beberapa faktor lainnya adalah aspek Marketing, dimana Bank RiauKepri Cabang Syari'ah Pekanbaru juga mempunyai potensi pasar yang cukup besar di Riau mengingat mayoritas penduduk Riau beragama Islam. Selanjutnya aspek syari'ah, dimana masih banyak kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan pihak konvensional yang menggunakan sistem Riba. Dari beberapa pengalaman terbukti bahwa perbankan syari'ah memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu lalu.

Beberapa aspek diatas memungkinkan beroprasinya Bank RiauKepri Cabang Syari'ah Pekanbaru untuk memenuhi kebutuhan segmen masyarakat yang

memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah Bank Riau maupun yang belum.

Bank pembangunan daerah Riau merupakan kelanjutan kegiatan usaha dari PT. BAPERI (Bank Pembangunan Daerah Riau) yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Syawal Sutan diatas No. 1 Tanggal 02 agustus 1961, dan izin menteri keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-45 Tanggal 12-08-1961. Selanjutnya dengan surat keputusan Gubernur KDH. Tk. 1 Riau No.51/IV/1966 dinyatakan berakhir segala kegiatan PT. BAPERI. Seluruh aktiva dan pasiva PT. BAPERI dilebur kedalam Bank pembangunan Daerah Riau yang disesuaikan dengan undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang bank pembangunan daerah. Terhitung tanggal 1 april 1966 secara resmi kegiatan bank pembangunan daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.<sup>10</sup>

Pendiri Bank RiauKepri Cabang Syari'ah Pekanbaru diawali melakukan restrukturisasi organisasi Bank Riau dengan membentuk Unit Usaha Syari'ah (UUS) melalui Surat Keputusan Direksi BPD Riau No. 44/KEPDIR/ 2002 pada tanggal 01 Oktober 2002. Prestrukturisasi organisasi ini kala itu dilakukan juga untuk mengatasi perubahan sistim teknologi informasi PT. Bank RiauKepri yang telah Online serta terjadinya perubahan bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Terbatas ( PT ).

Akselarasi pendiri Bank RiauKepri Cabang Syari'ah Pekanbaru dipercepat dengan pembwntukan tim Pengembangan Unit Usaha Syari'ah Bank Riau Syaria'ah dengan Surat Keputusan (SK) Direksi PT. Bank Riau

---

<sup>10</sup> Tim Bank Riau, *Proit Bank Riau Syariah Pekanbaru*, (Pekanbaru: PT. Bank Riau, 2007), h. 4.

No.39/KEPDIR/2003. Seiring dengan terbentuknya tim ini maka unit usaha syari'ah (UUS) sebagai koodinator pendiri Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru bekerja sama dengan sebuah konsultan perbankan syariah. Pendamping oleh konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen sumberdaya insani baik internal maupun ekstrnal, marketing research, training simulasi serta penyusunan standar oprasional dan prosedur. Kesiapan sumberdaya insani juga dibekali secara insentif dengan pelatihan, training dan seminar perbankan syari'ah yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga kala itu.

Pengajuan izin prinsip pendirian Bank Riau Syari'ah Kepulauan Riau ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 juni 2004. Persetujuan dari Bank Indonesia didapatkan tanggal 27 februari 2004 melalui surat BI No: 6/7/Dpbs/pbr KBI Pekanbaru. Sebelum izin prinsip ini diajukan, Bank Riau Syari'ah Kepulauan Riau juga melakukan berbagai hal untuk memuluskan langkah dalam pendirian Bank RiauKepri Cabang Syari'ah Pekanbaru termasuk rehab gedung untuk kantor cabang syari'ah dan UUS, persiapan aplikasi IT syari'ah dan lain-lain. Pengurusan izin oprasional dikirim kebank Indonesia tanggal 21 mei 2004. Izin oprasional diterima pada bulan juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroprasinya Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah. Strategi yang diterapkan pada awal berdirinya Bank Riau Kepri Syariah adalah dengan membuka kantor cabang di pekanbaru yang menjadi pusat pemerintahan dan perkantoran Provinsi Riau yang merupakan Bumi Melayu yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

Pada tanggal 1 dan 22 Juli 2004 dilaksanakan *Soft & Grand Opening* Bank Riau Kepri Syariah yang dihadiri Deputy Gubernur Bank Indonesia Maulana

Ibrahim dan Gubernur Riau HM Rusli Zainal serta Ketua DPRD Provinsi Riau Chaidir MM. Bank Riau Syari'ah Kepri Tanjung Pinang sebagai cabang kedua mulai beroperasi sejak tanggal 17 februari 2006 diresmikan oleh wakil Gubernur Provinsi Riau Bapak HM Sani. Sampai bulan desember 2007 Bank Riau Kepri Cabang Syariah telah memiliki 2 (dua) kantor cabang syari'ah yaitu Pekanbaru dan Tanjung Pinang serta satu kantor kas pimpinanan Muhammadiyah Pekanbaru di Jl. KH. Ahmad Dahlan Pekanbaru serta delapan kedai layanan syari'ah (KLS).<sup>11</sup>

Pada tanggal 25 mei 2009 Wakil Bupati Inhil Rosman Malomo didampingi direktur utama Bank Riau Erzon membuka secara resmi beroprasinya Bank Riau Syari'ah cabang tembilahan jalan sudirman dan Bank Riau Syari'ah Cabang pembantu Guntung Kecamatan Kateman. Dalam sambutannya, wakil Bupati sangat menyambut baik kehadiran Bank Riau Syari'ah dikota Tembilahan sebagai institusi perbankan yang berbasis Islami karena mayoritas masyarakat Indra Giri Hilir (INHIL), khususnya kota mendukung perekonomian Masyarakat.

#### **B. Visi dan Misi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru**

Adapun yang menjadi Visi dari Bank RiauKepri Syariah yaitu “ Menjadi mitra syariah jasa layanan perbankan yang terkemuka di Daerah, sehat dan kompetitif sesuai dengan prinsip syariah”.

---

<sup>11</sup> Compani profit Bank Riau Syari'ah, per 30 september 2001. h. 1

Misi dari Bank RiauKepri Syariah adalah: “Secara teguh memenuhi prinsip kehati-hatian, mampu mendukung sektor riil dan konsisten menjalankan prinsip syariah secara optimal”. Corporate Image adalah “Mitra Syariah Terpercaya”.<sup>12</sup>

### **C. Struktur Organisasi, Tugas, dan Wewenang Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru**

Dalam Islam tidak ada satupun yang dapat dikerjakan secara bersama tanpa seorang pemimpin. Kesuksesan dan kemakmuran dalam bisnis itu bergantung pada kemampuan dan efisiensi organisasinya dengan melatih para pemimpinnya dan memperbaiki institusi organisasinya dengan pelayanan yang paling baik dan efisien jelas akan mengalami kesuksesan, bila organisasi itu solid maka diibaratkan sebagai suatu bangunan yang tersusun kokoh.<sup>13</sup>

Manajemen bank syariah tidak jauh berbeda dengan manajemen bank pada umumnya (bank konvensional) namun dengan adanya landasan syariah serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang menyangkut bank syariah antara lain PP No. 72 tahun 1992, tentu saja baik organisasi maupun sistem operasional bank syariah terdapat perbedaan dengan bank pada umumnya, terutama terdapat dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi.

Organisasi pada intinya adalah interaksi-intraksi orang dalam sebuah wadah untuk melakukan suatu tujuan yang sama, dalam Islam organisasi merupakan suatu kebutuhan, organisasi berarti kerjasama, organisasi tidak diartikan semata-mata sebagai wadah. Pengertian organisasi itu ada dua, yaitu: pertama, organisasi

---

<sup>12</sup>Dokumentasi Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru 2012 (*Brosur-brosur Bank Riau Kepri Syariah* 2012)

<sup>13</sup>Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2003), Cet. Ke-3, h.153.

sebagai wadah atau tempat, kedua, organisasi sebagai proses yang dilakukan bersama, dengan landasan yang sama, tujuan yang sama dan juga dengan cara yang sama.<sup>14</sup>

Suatu badan usaha sangat memerlukan struktur organisasi yang berguna untuk mendukung kelancaran dan mengatasi masalah yang dihadapi dan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Struktur organisasi memerlukan suatu sarana untuk menunjukkan kewajiban, tugas, dan wewenang serta tanggungjawab bagi setiap anggota organisasi dalam melaksanakan fungsi masing-masing sehingga akan tercapai suatu kerjasama yang baik diantara anggota organisasi dan semua kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

Maju mundurnya suatu perusahaan sangat ditentukan oleh organisasi yang baik. Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas serta wewenang tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam suatu perencanaan.<sup>15</sup>

Struktur organisasi juga berarti suatu kerangka kerja yang tersusun rapi sehingga setiap bagian merupakan suatu kesatuan dan bersifat saling mempengaruhi dengan kata lain stuktur organisasi bisa juga terdapat kegiatan kerjasama setiap karyawan-karyawan yang ditetapkan oleh perusahaan. Adapun struktur organisasi Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Didin Hafihudin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, (jakarta: Gema Insani, 2003), Cet-3.h. 27.

<sup>15</sup>Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. 5, h. 163



Dalam melaksanakan fungsi suatu lembaga perbankan, berdasarkan keputusan direksi Bank Riau Syariah No. 22/KEPDIR/1995 tentang susunan organisasi dan tata kerja bank Riau Syariah maka berikut ini dapat diuraikan tentang tugas pokok dan garis besar pekerjaan.

### **1. Dewan Pengawas Syariah**

Dewan pengawas syariah adalah badan independen yang ditetapkan oleh dewan pengawas syariah nasional pada bank. Anggota dewan pengawas syariah terdiri dari sebanyak-banyaknya tiga orang dan sekurang-kurangnya dua orang, serta salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai ketua.<sup>16</sup> Adapun yang membedakan Bank Syariah dan bank konvensional adalah Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan tuntunan syariah. Penetapan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Syariah terdiri dari Ketua dan 2 (dua) orang anggota yaitu, Drs. H. Muchtar Samad (ketua), Dr. H. Mahdini, MA (anggota), dan Drs. Heri Sunandar, MCL (Anggota). Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah (Bank Riau Syariah) adalah :

- a. mengawasi jalannya operasionalisasi Bank sehari-hari, agar sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Membuat pernyataan berkala ( setahun sekali) bahwa bank Riau syariah telah berjalan sesuai ketentuan syariah.

---

<sup>16</sup> Tim BI, *PBI No. 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009 ), h. 9.



- c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari Bank Riau Syariah. Meneliti dan merekomendasi produk baru dari produk bank Riau Syariah.

## **2. Divisi usaha syariah**

Divisi unit layanan syariah adalah divisi yang membawahi kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan layanan syariah. Tugas-tugas pokok divisi usaha syariah adalah:

- a. Menyusun dan merumuskan strategi serta program pemasaran produk jasa syariah.
- b. Mengelola laporan, melakukan review serta evaluasi terhadap semua pelaksanaan aspek operasional usaha syariah.
- c. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha dibidang pembiayaan dan intervestasi serta operasional syariah.
- d. Merumuskan dan mengembangkan bisnis dan jaringan sesuai usaha syariah
- e. Menyusun kan rencana kerja dan anggaran dasar divisi usaha syariah serta melakukan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaannya
- f. Mengatur dan mengawasi cabang syariah.

## **3. Pemimpin Cabang**

Pemimpin cabang adalah orang yang bertanggung jawab secara penuh terhadap berjalannya operasional bank dicabang tersebut. Tugas-tugas pemimpin cabang adalah:

- a. Bertanggung jawab dalam hal pengelolaan cabang dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai target (anggaran).

- b. Menetapkan strategi pencapaian anggaran termasuk pengembangan SDM kantor cabang.
- c. Menetapkan kebijakan dalam menjalankan kepemimpinan dan pengurusan.
- d. Mengatur ketentuan-ketentuan persoalan kepegawaian termasuk penetapan gaji, pensiunan dan jaminan hari tua serta penghasilan lain-lain bagi pegawai perseroan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan.
- f. Mengupayakan pemberian pembiayaan yang berkualitas tinggi.
- g. Memantau hasil dari audit cabang dan mengambil tindakan koreksi bila diperlukan.
- h. Dapat memberikan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan.

#### **4. Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah**

Pimpinan seksi pelayanan nasabah mempunyai tugas membantu pimpinan cabang dalam terlaksananya pelayanan prima terhadap nasabah.

#### **5. Pimpinan Seksi Pemasaran**

Pimpinan seksi pemasaran yaitu orang yang bertugas dalam mengelola hal-hal yang berhubungan dengan pemasaran terutama masalah pembiayaan yang meliputi:

- a. Analisa pembiayaan

Analisa pembiayaan yaitu orang yang bertugas menganalisa dan memberikan laporan aspek yuridis mengenai permohonan pembiayaan dari nasabah.

b. Pelaksanaan penyaluran pembiayaan macet

Pelaksana penyaluran pembiayaan macet yaitu orang yang bertugas menyusun laporan-laporan yang berhubungan dengan pembiayaan macet.

## **6. Pimpinan Seksi Oprasional**

Bagian ini mempunyai tugas membantu pimpinan cabang mengelola dan melaksanakan oprasional cabang secara efektif dan efesien dibidang oprasional berdasarkan sistem syariah dan ketentuan yang berlaku untuk mencapainya.

- a. Target oprasional cabang yang meliputi penghipunan dana, pembiayaan, hasil usaha, jasa-jasa dan kualitas aktiva produk.
- b. Kelancaran pelayanan kepada nasabah maupun investor.
- c. Administrasi akuntansi secara benar.
- d. Ketepatan dalam pelaporan baik kepada kantor pusat maupun kepada pihak eksternal.

## **7. Account Officer**

Account officer (AO) adalah orang yang bertugas mencari nasabah yang layak, sesuai dengan kriteria yang peraturan Bank, menilai, mengevaluasi, mengusulkan besarnya pembiayaan yang diberikan. Mengenali usaha layak untuk dibiayai, juga menyelesaikan kasus atau masalah debitur yang mungkin terjadi.

Tugas accout officer yaitu:

- a. Membuat perencanaan usaha apa saja yang layak dibiayai diwilayahnya dan berapa kira-kira dana yang diperlukan untuk menyalurkan pembiayaan tersebut.

- b. Menjadi konsultan, AO memandu nasabah agar dapat membuat neraca perkiraan usaha nasabah, serta cash flow kemampuan membayarnya.
- c. Melakukan cek dan re cek, dan melakukan analisa.

## **8. Teller**

Teller yaitu karyawan yang bertugas menerima dan melayani setoran atau penarikan, baik secara tunai maupun non tunai dari nasabah.

## **9. Customer Service**

Customer service adalah karyawan yang bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah baik untuk membuka rekening atau konsultasi tentang bank RiauKepri Syariah.

## **10. Unit Layanan Syariah (*Office Channelling*)**

Unit layanan syariah adalah layanan syariah yang ada di kantor caban dan cabang pembantu Bank RiauKepri. Bertugas menerima pembukaan rekening syariah di kantor cabang dan kantor cabang pembantu.

## **11. Pelaksanaan Administrasi Pembiayaan**

Bagian ini mempunyai tugas:

- a. Terlaksananya kegiatan pemasaran produk dan jasa-jasa baik kepada masyarakat di wilayah kerjanya serta mengurus masalah administrasi pembiayaan.
- b. Tercapainya target oprasional yang telah ditetapkan oleh kepala Cabang.
- c. Tercapainya pelayanan yang prima kepada nasabah.

## **12. Pelaksana Akuntansi Laporan**

Pelaksana akuntansi laporan yaitu karyawan yang bertugas melaksanakan administrasi akuntansi secara benar, ketepatan dalam pelaporan baik kepada kantor pusat maupun kepada pihak eksternal.

## **13. Gadai (*Rahn*)**

Petugas *Rahn* bertugas melayani khusus nasabah yang melakukan pengadaian barang-barang berharga seperti emas, kendaraan dan lainnya.

## **14. Bagian Umum**

Bagian Umum yaitu karyawan yang bertugas dalam menyiapkan segala administrasi kantor seperti surat menyurat.

### **D. Aktivitas Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru**

Bank umum yang lebih dikenal dengan nama bank komersil merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. bank umum juga memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan bank perkreditan Rakyat (BPR), baik dalam bidang ragam pelayanan maupun jangkauan wilayah operasional. Artinya, bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi diseluruh wilayah Indonesia.

Salah satu pernyataan beroprasinya Bank Riau Kepri Syari'ah adalah dimilikinya produk syari'ah yang didasarkan atas dasar fatwa DSN-MUI dan disahkan oleh Bank Indonesia. Pada awal beroprasinya Bank Riau Kepri Syari'ah

Cabang Pekanbaru telah memiliki 21 (Dua Puluh Satu) macam produk berikut standar operasional produknya ( SOP ).<sup>17</sup>

Produk dari Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru pada dasarnya terdapat tiga bagian yaitu produk penghimpunan dana, produk pembiayaan dan produk jasa. Produk-produk tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Penghimpunan Dana**

Dalam produk penghimpun dana, terdapat tabungan, deposito dan giro yang dijelaskan dibawah ini:

#### **a. Tabungan iB Sinar**

Tabungan iB Sinar adalah tabungan yang berdasarkan prinsip bagi hasil mudharabah muthalaqah. Dengan prinsip ini, tabungan nasabah diperlukan sebagai investasi dan produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, perusahaan dan profesional yang memenuhi kaidah syariah. Tabungan iB Sinar memiliki manfaat, diantaranya yaitu setoran awal pembukaan rekening hanya Rp 50.000, dapat melakukan melakukan penarikan tunai di ATM Bank Riau 13.000 ATM Bersama, dapat melakukan penarikan tunai di 6.500 ATM MEPS Malaysia, kemudahan transaksi tarik dan setor tunai diseluruh jaringan kantor Bank Riau Syariah serta aman dan sesuai syariah.

---

<sup>17</sup> Mukhtar Samad, *Bank RiauKepri Syari'ah Cabang Pekanbaru*. ( Pekanbaru: 2007 ), h. 12.

b. Tabungan iB Sinar Mahasiswa

c. Tabungan iB Dhuha (Haji & Umrah)

Tabungan iB Dhuha adalah produk tabungan haji yang dirancang khusus untuk membantu nasabah merencanakan ibadah haji reguler (melalui SISKOHAT), haji plus dan umrah. Kini tabungan iB Dhuha hadir dalam 2 (dua) skim syariah. Pertama, simpanan yang bersifat titipan wadiah (dhuha bebas) sehingga nasabah bebas kapan saja merencanakan waktu keberangkatan haji dan umrah secara bebas menentukan nominal setoran berdasarkan kemampuan. Kedua, simpanan dengan kontrak bagi hasil mudharabah antara bank dan nasabah (Dhuha Terencana) dimana nasabah akan memperoleh porsi (nisbah) bagi hasil dari keuntungan usaha bank. Namun waktu keberangkatan serta jumlah setoran perbulannya telah direncanakan sesuai dengan keinginan nasabah.

d. Deposito iB

Deposito iB bank Riau adalah simpanan dana berjangka dengan menggunakan akad mudharabah muthalqah, yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Produk ini hadir agar simpanan anda diBank diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu dan Insyaallah mendapat bagi hasil atas hasil usahabank. Melalui deposito iB Bank Riau insyaAllah Anda akan memperoleh barokah dan mendapatkan bagi hasil yang akan dilimpahkan secara langsung kerekening anda setiap bulan.

e. Giro iB

Giro iB adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro, sarana perintah pelayanan lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Giro iB memiliki manfaat fleksibilitas dalam bertransaksi, dapat digunakan sebagai reerensi ban, meningkatkan citra pribadi dan perusahaan, memberikan kemudahan dan kenyamanan, serta praktis dan akurat.

## **2. Pembiayaan Pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru**

a. iB Pengusaha Kecil

Pembiayaan iB pengusaha kecil disediakan untuk membantu pengusaha kecil baik secara perorangan maupun kelompok dalam memperoleh tambahan modal kerja atau investasi dengan prinsip murabahah. Usaha yang dibiayai adalah semua sektor-sektor ekonomi yang produktif terkecuali sektor-sektor ekonomi yang dilarang berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

b. iB Aneka Guna

pembiayaan iB Aneka Guna adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi dan pengusaha dalam rangka pembiayaan tanah untuk perumahan, pembangunan/ rehabilitasi/ renovasi rumah sendiri, pembelian prabot dan peralatan rumah tangga serta kebutuhan lainnya, sesuai dengan prinsip syariah.



Pembiayaan iB Aneka Guna juga dapat diberikan untuk menunjang kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan oleh nasabah yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pokoknya.

c. iB Kendaraan Bermotor

Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor nasabah adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai berpenghasilan tetap, pensiun, pekerja propesi dan pengusaha dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).

d. iB Niaga Prima

iB Niaga Prima adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu badan usaha guna memenuhi kebutuhan terhadap aktiva tetap, aktiva lancar dan barang bergerak.

e. iB Pemilikan Rumah

iB Pemilikan Rumah adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai berpenghasilan tetap, pensiunan, pekerja profesi dan pengusaha untuk memiliki tanah dan bangunan di atasnya termasuk rumah susun, ruko, apartemen, kios, dan kapling siap dibangun dengan prinsip mudharabah.

f. iB Karya Prima

Pembiayaan iB Karya Prima adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu rekanan mendapatkan tambahan modal kerja dalalam rangka pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja dari instansi pemerintah atau instansi lainnya. Objek yang dapat dibiayai antarlain:

1. pembangunan gedung
2. pembanguna jalan raya
3. pengadaan barang dan jasa
4. pekerjaan asilitas umum / konstruksi lainnya.<sup>18</sup>

### **3. Jasa Perbankan**

- a. Kliring
- b. Bank garansi iB
- c. Referensi bank
- d. Surat dukungan bank
- e. Inkaso
- f. Kiriman uang iB

### **4. Produk unggulan lainnya**

Gadai emas iB (Rhan) adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru kepada nasabah dengan jaminan berupa emas, perhiasan atau emas batagan dengan mengikuti prinsip gadai.

---

<sup>18</sup> Bank Riau, loc. cit

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TEORI TENTANG DISTRIBUSI BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH**

### **A. BAGI HASIL**

#### **1. Pengertian Bagi Hasil**

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*).

Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan lebih dahulu pada awal terjadi kontrak. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*, (Jakarta: UII Press, 2001), h. 118.

Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.<sup>20</sup>

## 2. Teori Distribusi Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*, *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.”<sup>21</sup> Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan/bulanan.

Mekanisme lembaga keuangan syariah pada pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 191.

<sup>21</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, ( Jakarta: Grasindo, 2002), h. 122.

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 118.

Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara *eksplisit* disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuiti shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.

Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.

### **3. Investasi Berdasarkan Bagi Hasil**

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua bentuk kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian

atau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit dan loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.<sup>23</sup>

#### 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada 2 yaitu:<sup>24</sup>

##### 1. Faktor Langsung

Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil *adalah investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*), penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a) *Investment rate* merupakan prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

---

<sup>23</sup> Muhammad, *Op. cit.* h. 19.

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 110.

c) Nisbah (*profit sharing ratio*)

Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu BPRS dan BPRS lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu BPRS, misalnya pembiayaan mudharabah 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor Tidak Langsung

Faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil:

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*

*Shahibul Maal* dan *Mudharib* akan melakukan share baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya.

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

## B. MUDHARABAH

### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 226.

*Mudharabah* adalah meleburnya badan (tenaga) disatu pihak dengan harta dari pihak lain. Artinya, satu pihak bekerja, sedangkan yang lain menyerahkan harta. Kedua belah pihak kemudian sepakat mengenai prosentase tertentu dari hasil keuntungan yang diperoleh, semisal  $\frac{1}{3}$  (33,3%) dari laba atau  $\frac{1}{2}$  (50%) dari hasil keuntungan. Contoh: satu pihak menginvestasikan modal sebesar 1.000, sedangkan pihak lain mengelola modal tersebut, kemudian hasil keuntungannya dibagi oleh kedua belah pihak.<sup>26</sup>

*Syirkah mudharabah*, yang disebut juga dengan *qiradh*, adalah kerja sama usaha (kemitraan bisnis) antara badan dengan harta. Artinya, seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dalam suatu usaha, dengan ketentuan, keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi dua di antara mereka sesuai dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Hanya saja, ketika terjadinya kerugian dalam *syirkah mudharabah* ini, kerugian tidak dikembalikan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan *syirkah*, namun dikembalikan pada ketentuan *syariah*. Menurut *syariah*, dalam *syirkah mudharabah*, kerugian secara khusus hanya dibebankan pada harta, dan tidak dibebankan kepada pengelola selain menanggung kerugian berupa tenaga yang dikeluarkan.<sup>27</sup>

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modalnya sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara

---

<sup>26</sup> Taqiyuddin an-Nabhani. *Op. cit.* h. 102-103.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 207.



*mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>28</sup>

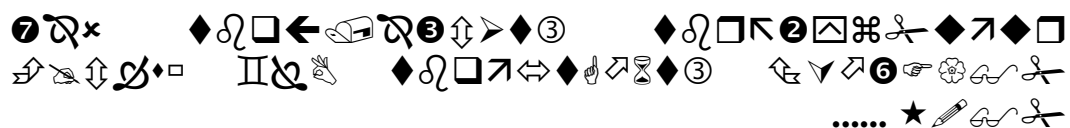
*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana.<sup>29</sup>

## 2. Landasan Hukum Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

### a) Al-Qur'an

Al-Qur'an menyatakan bahwa orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah: hal tersebut dijelaskan dalam QS. Al-Muzzammil : 20



<sup>28</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95.

<sup>29</sup> PSAK No 105, *Ikatan Akuntan Indonesia*, ( Jakarta: Graha Akuntan, 2007). Cet ke-1, h.1-2.

Artinya: *"dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..."* (Al-Muzzammil: 20).<sup>30</sup>

Makna dari surat al-Muzzammil : 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

Allah juga berfirman dalam Qur'an surah Al-Jum'ah ayat 10:



Artinya: *"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah..."* (Q.S. Al-Jumu'ah: 10).<sup>31</sup>

Dan selanjutnya pada surat Al-Baqarah ayat 198:



Artinya: *"Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari Karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu..."* (Q.S. Al-Baqarah: 198).<sup>32</sup>

Surat al-Jumu'ah:10 dan al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

#### b) Al-Hadits

اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ

مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًّا وَلَا يَسْتَرِي بِهِ دَابَّةً

فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُجِزَ.

<sup>30</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-'Aliyy*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000). h. 459.

<sup>31</sup> *Ibid.* h. 442.

<sup>32</sup> *Ibid.* h. 24.

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib pernah memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut pada Rasulullah Saw dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR. Thabrani).<sup>33</sup>

c) Ijmak

Ijmak Sahabat juga telah menyepakati kebolehan syirkah *mudharabah*, Ibnu Qudamah didalam kitab Al-Mughni, dari bapaknya, dari kakeknya, juga menuturkan bahwa Utsman ra. Pernah melakukan *qiradh* (*mudharabah*) dengannya, disebutkan pula dari Ibnu Mas'ud dan Hakim bin Hazzam bahwa mereka berdua pernah melakukan *qirad* (*mudharabah*). Semua ini disaksikan oleh para Sahabat, tidak ada riwayat bahwa ada orang yang menentanginya, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Dengan demikian, hal itu menunjukkan adanya ijmak mereka ataskebolehan syirkah *mudharabah* ini.<sup>34</sup>

Indikasi dari hadis ini adalah menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah* dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini, seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari *return on investment* (keuntungan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Thabrani, *Sunan Thabrani*, (Beirut: Dar al-fikr, 1994). h.190.

<sup>34</sup> *Ibid.* h. 210.

<sup>35</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005 ), h.15.

d) Qiyas

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>36</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Ada beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), pihak kedua sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Syarat keduanya adalah pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.<sup>37</sup>

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.

---

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh. op.cit.* h. 226.

<sup>37</sup> Syafi'i Antonio, *op.cit.* h. 174.

Modal yang diserahkan berbentuk uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain<sup>38</sup>.

Syarat objek *mudharabah* adalah:

- modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang);
- modal harus tunai.<sup>39</sup>

Para fuqaha tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.<sup>40</sup>

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

"Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip '*antaraadhim minkum* (sama-sama rela)."<sup>41</sup> Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana dan si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

---

<sup>38</sup> Karim, *op.cit.*, h. 194.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 175.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h.194.

<sup>41</sup> *Ibid.*

Syaratnya adalah melafazkan ijab dari yang punya modal dan qabul dari yang menjalankannya.<sup>42</sup>

d. Nisbah Keuntungan

"Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah*."<sup>43</sup> *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Syaratnya adalah:

- 1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak;
- 2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu kontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan;
- 3) Nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu;
- 4) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan pengelola.<sup>44</sup>

#### 4. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Menurut PSAK No 105 paragraf 4, *mudharabah* terbagi menjadi tiga jenis:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

---

<sup>42</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, *op.cit.*, h. 73.

<sup>43</sup> Karim, *op.cit.*, h.194.

<sup>44</sup> Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, *op.cit.*, h. 176.

*Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Biasanya bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Jenis usaha disini mempunyai syarat yaitu aman, halal dan menguntungkan.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi istilah lainnya *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

c. *Mudharabah Musytarakah*

*Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

## 5. Teknik Pembiayaan *Mudharabah* dalam Perbankan

Teknik *mudharabah* dalam perbankan sebagai berikut:

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama;

- 2) Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
  - a. perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*);
  - b. perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*);
- 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana;
- 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah;
- 5) Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.<sup>45</sup>

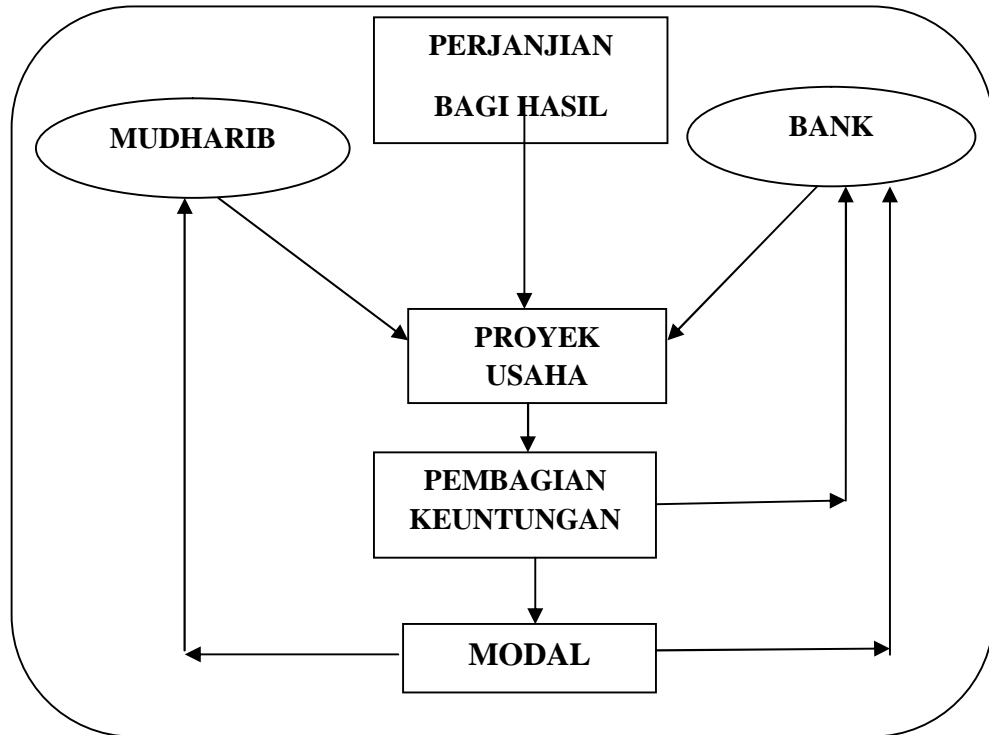
---

<sup>45</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004). h. 70-71.



Secara umum skema *mudharabah* dapat dilihat dibawah ini:

Gambar 2.1 Skema *Mudharabah*



Sumber: Skema Mudharabah *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Muhammad Antonio Syafi'I, Jakarta 1999, h. 184.

## 6. Komponen Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*

Beberapa hal yang terkait dengan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- Saldo pembiayaan
- Jangka waktu pengembalian
- Sistem pengembalian, apakah mengangsur atau ditangguhkan
- Hasil yang diharapkan oleh BPRS
- Nisbah bagi hasil

<sup>46</sup> Zainul, Arifin, *op.cit.* h. 112

- f) Proyeksi pendapatan dari calon peminjam. Berdasarkan pengalaman usaha sebelumnya, proyeksi ini lebih mudah diketahui.
- g) Realisasi pendapatan yang sesungguhnya. Berdasarkan laporan keuangan peminjam, besar kecilnya laba aktual menjadi dasar dalam pengambilan tingkat bagi hasil.
- h) Tingkat persaingan harga, baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun dengan lembaga konvensional.

## 7. Metode Distribusi Bagi Hasil Dalam Mudharabah

Dalam operasional bank syariah dituntut untuk selalu sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini menuntut kehati-hatian pengelola bank syariah. Selain itu bank syariah juga dituntut mampu bersaing dengan bank konvensional yang berjalan dengan sistem bunga, operasi bank syariah diantaranya dengan mengembangkan metode pembagian hasil usaha sebagaimana yang terdapat dalam PSAK No 59 paragraf 23, pada dasarnya lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi keuntungan (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan nasabah.<sup>47</sup>

*Revenue Sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana, apabila bank menggunakan metode perhitungan bagi hasil berdasarkan *revenue Sharing* yang berarti dimana bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi biaya-biaya bank. Sedangkan *Profit sharing* (bagi laba atau untung) yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan

---

<sup>47</sup> PSAK No 59, *Ikatan Akuntan Indonesia*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2000). Cet ke-1.

setelah dikurangi biaya pengelolah dana. Apabila bank menggunakan sistem *profit sharing* dimana bagi hasil dihitung dari pendapatan *neto* setelah dikurangi biaya operasional bank.<sup>48</sup>

**Tabel 2.1 Contoh Metode Bagi Hasil**

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	150	<i>Revenue Sharing</i>
Harga Pokok Penjualan	95	
Laba Kotor	55	
Beban	15	
Laba Rugi Bersih	40	<i>Profit Sharing</i>

Sumber: PSAK No 59

Semenjak ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang yang oleh DSN-MUI efektif tanggal 1 Januari 2008, maka PSAK No 59 sudah digantikan dengan PSAK No 105. Dimana dalam pembagian bagi hasil bank menggunakan metode, yaitu:<sup>49</sup>

1. *Profit sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari total biaya. Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> PSAK No 105. *Op.cit.*

didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>50</sup>

Kerugian pada pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun secara keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Hasil usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan total *cost* terhadap total *revenue*.

## 2. *Gross Profit*

Yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi harga pokok penjualan. Berdasarkan metode ini, pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan dengan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba *bruto* (*gross profit*) bukan dari proyeksi usaha. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba *neto* yaitu laba *bruto* dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

---

<sup>50</sup>Tim pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta : djambatan, 2001), h. 264.

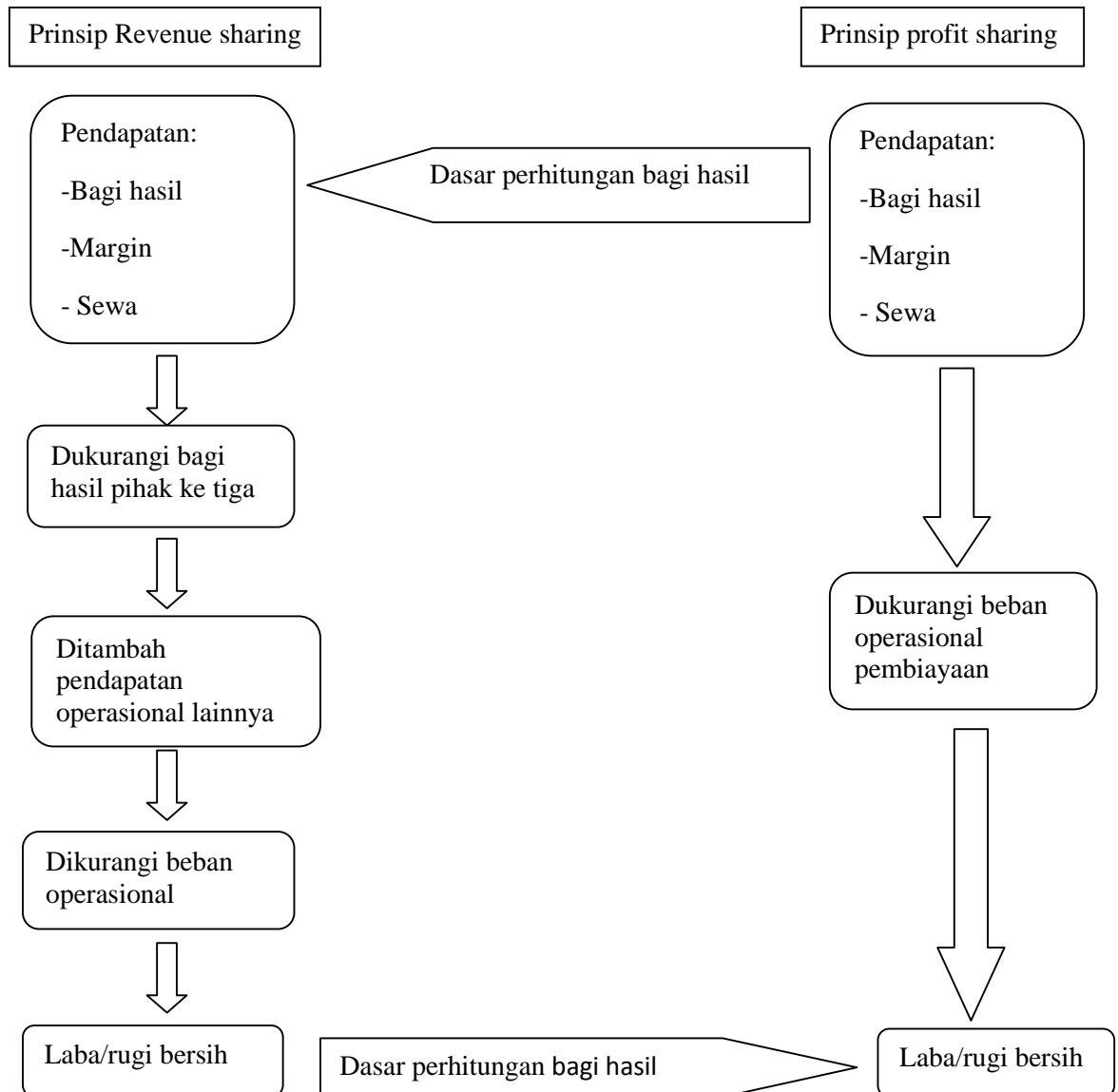
**Tabel 2.2 Contoh Metode Bagi Hasil**

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	25	
Laba Rugi Bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

Sumber: PSAK No 105

Bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil *revenue sharing* dan *profit sharing* sebagai dasar bagi hasil, *revenue sharing* adalah nilai penjualan suatu barang yakni harga pokok ditambah margin pendapatan, dalam dasar bagi hasil bank syariah yakni pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual dan dalam Akuntansi biasanya disebut *gross profit*. Secara ideal prinsip *profit sharing* lebih mencerminkan laba yang sesungguhnya karena dihasilkan dari perhitungan seluruh pendapatan dikurangi seluruh biaya, namun secara teknis di lapangan prinsip *profit sharing* membuka peluang yang besar adanya ketidakseimbangan informasi antara *sahibul maal* dan *mudharib*, yang dapat menimbulkan kerugian bagi *sahibul maal*. Untuk mempermudah bagaimana membedakan kedua prinsip perhitungan bagi hasil, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2: Skema Perbedaan prinsip bagi hasil *Revenus sharing* dan *Profit sharing*



Sumber: Muhammad, Teknik perhitungan bagi hasil dan frofit margin pada bank syariah, Jakarta: 2004, h. 19

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada dasarnya Bank RiauKepri merupakan salah satu bank yang dalam operasionalnya menggunakan sistem konvensional. Seiring dengan tuntutan zaman serta tingginya keinginan masyarakat untuk kembali kepada Islam, di antaranya dengan bertransaksi sesuai Islam, maka pada tanggal 22 Juli 2004 PT. Bank RiauKepri mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) yang diberi nama Bank RiauKepri Cabang Syariah dengan modal operasional awal sebesar Rp. 20 Miliar.

Dibukanya Unit Usaha Syariah (UUS) Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru harus menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Dengan menerapkan prinsip tersebut, Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru akan mampu mewujudkan tujuannya dalam mensejahterakan masyarakat dengan memberikan permodalan kepada masyarakat dalam berusaha. Hal ini relevan dengan salah satu misi lahirnya bank syariah, yaitu melakukan mobilisasi dana dari golongan menengah, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil.

Pembiayaan merupakan salah satu misi utama dari bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana tersebut. Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bab I pasal I No.25, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah: Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>57</sup>

Dalam bab ini akan dibahas dua permasalahan, yaitu: Pertama, metode perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru; Kedua, penerapan distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan ketentuan PSAK No 105;

#### **A. Metode Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru**

Menurut PSAK No. 59 paragraf 25, menyatakan bahwa:

Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana *mudharabah*.<sup>58</sup>

Pada dasarnya pada lembaga keuangan syariah boleh menggunakan dua metode perhitungan yaitu 1) prinsip bagi hasil (*revenue sharing*), 2) prinsip bagi keuntungan (*profit sharing*). Prinsip *revenue sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sedangkan *profit sharing* yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelola dana. Namun bank lebih cenderung kepada metode *revenue*

---

<sup>57</sup> Undang-Undang No.21 tahun 2008. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Cet, ke-1, h. 7.

<sup>58</sup> PSAK No 5. *Op.cit.*



*sharing*, karena metode ini lebih aman dan lebih menguntungkan pemilik dana (bank).

Dapat diketahui bahwa metode *revenue sharing* berbeda dengan *profit sharing*. Perbedaannya, dapat dilihat dari keputusan dalam pengambilan keuntungan dari pengelolaan dana yang diberikan kepada nasabah. Bahwa *revenue sharing* memberikan peluang kepada bank syariah, di mana dalam menghitung keuntungan dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebelum dikurangi beban dalam mengelola usaha. Sementara, *profit sharing* kebalikan dari *revenue sharing*, di mana bank syariah menghitung keuntungan setelah dikurangi beban yang telah dikeluarkan dari pengelolaan pembiayaan yang diberikan.

Di samping itu, adanya perbedaan metode perhitungan pembiayaan bagi hasil dalam bank syariah tidak terlepas dari prinsip perhitungan dalam bank konvensional, yaitu perhitungan margin keuntungan dengan cara perhitungan keuntungan dengan menghitung bruto atau netto. Meskipun demikian, dari perbedaan tersebut memberikan peluang dan membolehkan kepada bank syariah dalam menghitung bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan.

Untuk mengetahui metode perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dalam Bank RiauKepri Syariah Cabang Pekanbaru dapat dilihat dari hasil wawancara penulis kepada karyawan Bank RiauKepri syariah cabang pekanbaru, sebagai berikut:

Dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru menerapkan metode *revenue sharing*. Metode ini diterapkan, dalam rangka kehati-hatian dan menghindari resiko yang akan dialami bank dalam mengelola dana yang dari nasabah.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru, di mana dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* menggunakan metode *revenue sharing* atau proyeksi pendapatan yang akan dihasilkan dengan nasabah, hal ini dilakukan karena menghindari resiko kerugian yang dialami oleh bank, karena banyaknya mudharib yang tidak jujur dan amanah dalam mengelola dana yang diberikan oleh *shahibul maal* (bank). Adapun banyak mudharib yang bersikap curang (jujur) dan tidak amanah dalam mengelola dana yang diberikan, dipengaruhi oleh faktor pemahaman mudharib tentang prinsip-prinsip bermuamalah. Secara internal (pihak bank) kurangnya tenaga ahli dalam melakukan analisis dari usaha yang prospek yang diajukan masyarakat kepada pihak bank. Sehingga, pihak Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap dana yang telah disalurkan untuk memodali usaha tersebut.

Di samping itu, dalam beroperasi di masyarakat Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru memberikan berbagai macam pembiayaan di antaranya pembiayaan *mudharabah*. Hal ini sebagaimana wawancara penulis kepada karyawan Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> Anton Indra Jaya, *Pinsi Oprasional Bank RiauKepri Cabang Syariah*, Wawancara, Pekanbaru, 17 Januari 2013.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai tempat atau lembaga yang mengatur lalu lintas keuangan berupa tempat menyimpan (tabungan), menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan, Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru menawarkan beberapa produk, di antaranya produk pembiayaan *mudharabah*. Dari sejumlah produk yang ditawarkan kepada masyarakat, di mana produk *mudharabah* memiliki tingkat resiko kerugian yang tinggi. Hal ini-lah yang mendorong pihak Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dalam melakukan perhitungan menggunakan metode *revenue sharing*.<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pembiayaan *mudharabah* yang ditawarkan Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru merupakan produk pembiayaan yang memiliki tingkat resiko yang tinggi. Hal ini sebagaimana telah dituliskan sebelumnya, bahwa tingginya resiko yang dialami Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dalam pembiayaan *mudharabah*, disebabkan rendahnya pemahaman yang dimiliki *mudharib* dalam menggunakan dan mengembangkan modal yang diberikan oleh bank.

Dengan rendahnya pemahaman yang dimiliki oleh *mudharib* (pengelola dana), sehingga *mudharib* dengan mudah melakukan kecurangan dan penzhaliman. Sikap *mudharib* (pengelola dana ) tersebut diketahui dari adanya laporan ganda yang dibuat pada saat melaporkan hasil dari usaha yang dijalankan. Dalam hal ini *mudharib* (pengelola dana ) memberikan laporan bersifat tidak riil kepada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan tujuan untuk meminamilisir pembagian keuntungan dari hasil usaha yang diperoleh. Sementara laporan secara riil dari hasil usaha tersebut, dibuat untuk mengukur tingkat keberhasilan dari usaha yang dijalankan.

---

<sup>60</sup> Helwin Yunus, *Karyawan Pinsi Pemasaran Bank RiauKepri Cabang Sayariah*, Wawancara, Pekanbaru, 17 Januari 2013.

Namun, laporan tersebut hanya digunakan untuk internal saja dan tidak dipublikasikan.

Penting berlaku adil dan menghindari praktek kecurangan dan penzaliman merupakan prinsip dasar bermuamalah dalam Islam. Hal sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:



Artinya: “*kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*”. (TQS. Al-Baqarah [2]: 279).<sup>61</sup>

Dari dalil di atas dapat dipahami bahwa secara umum Allah SWT melarang bersikap zhalim dalam *bermuamalah*. Meskipun secara spesifik dalil di atas bercerita tentang kezahaliman dari praktek *ribawi*. Namun, dalil tersebut dapat juga berlaku untuk umum, dalam semua masalah *muamalah*. Dengan demikian, membuat laporan pembukuan ganda dari hasil usaha, dengan tujuan untuk menzalimi, hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan dalam syar’at Islam (*muamalah*).

Di samping itu, dari sikap *mudharib* (pengelola dana) dalam membuat laporan ganda dari hasil usaha yang dilakukan merupakan suatu tindakan yang tidak mengedepankan sikap keterbukaan (transparan) dalam bertransaksi muamalah dalam ekonomi. Padahal, dalam bertransaksi harus mengedepankan sikap keterbukaan tersebut. Dengan tidak mengedepankan sikap keterbukaan dalam bertransaksi, dapat dipastikan adanya saling tidak meridhai dari transaksi yang dilakukan. Sementara, dalam perspektif

---

<sup>61</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Loc.cit*, h. 47.

ekonomi Islam, ketika melakukan transaksi harus saling meridhai atau didasari atas konsep suka sama suka. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَن  
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu’ sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (TQS. An-Nisa [4]: 59).<sup>62</sup>

Berdasarkan dalil di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT melarang memperoleh harta dengan cara bathil. Kemudian, untuk menghindari kebathilan dalam suatu transaksi. hendaklah transaksi yang dilakukan didasari atas suka sama suka, termasuk dalam melaporkan hasil usaha yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* yang terjadi antara masyarakat selaku *mudharib* (pengelola dana) dan Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru selaku *shahibul maal* (pemilik dana).

Di sisi lain, pentingnya saling transparan (terbuka) dalam bertransaksi seperti membuat laporan pembukuan rill hasil dari usaha, karena sikap transparan tersebut merupakan salah satu yang harus dilakukan agar senantiasa selalu berdiri di atas pilar-pilar dalam ekonomi Islam. ada tiga pilar dalam ekonomi Islam, yaitu:

---

<sup>62</sup> Ibid, .

- 1) pilar kepemilikan,
- 2) pilar pengelolaan kekayaan, dan
- 3) pilar pendistribusian kekayaan di tengah masyarakat.<sup>63</sup>

Dalam perspektif ekonomi Islam, ketiga pilar di atas harus menjadi dasar dalam melakukan transaksi ekonomi. Dengan berpedomannya kepada pilar tersebut, maka nilai-nilai dalam ekonomi Islam di antaranya saling transparansi dalam ekonomi yang mengantarkan kepada sikap keterbukaan akan bisa dilaksanakan. Karena, ketiga pilar di atas menuntun tidak hanya sekedar memperoleh kekayaan dalam bentuk materi, akan tetapi memperoleh kekayaan dengan senantiasa selalu berada dalam ridha Allah SWT.

#### **B. Penerapan Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan ketentuan PSAK No 105.**

Setelah melakukan penelitian dari penerapan distribusi hasil pembiayaan mudharabah di Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru, yang kemudian diukur dengan ketentuan PSAK No. 105, perlu diketahui bahwa dalam penerapan bagi hasil pembiayaan mudharabah, pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru maka analisis dapat dibagi ke dalam beberapa butir sebagai berikut:

##### **1) Prinsip Pembagian Hasil Usaha**

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*, *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari

---

<sup>63</sup> M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Al-Azhar Press, 2009). Cet Ke-1.h. 125.

laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.<sup>64</sup> Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.<sup>65</sup>

Berdasarkan prinsip pembagian hasil usaha yang dimuat dalam ketentuan PSAK No. 105 maka didapat dua jenis prinsip pembagian hasil usaha pembiayaan *mudharabah* yaitu *gross profit margin* (laba bruto) dan *profit sharing* (laba bruto) Kemudian peneliti memperoleh fakta dari wawancara kepada karyawan Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru, sebagai berikut:

Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru menawarkan beberapa produk, di antaranya produk pembiayaan *mudharabah*. Dalam pembiayaan *mudharabah* ini pihak Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dalam melakukan perhitungan menggunakan metode *revenue sharing* (total omset).<sup>66</sup>

Maka dalam hal ini prinsip pembagian hasil usaha yang digunakan Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru belum sesuai dengan ketentuan PSAK No 105, karena pada ketentuan PSAK No 105 paragraf 11 disebutkan bahwa:

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika didasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usahanya adalah laba bruto (*gross profit*) bukan berdasarkan total pendapatan (*omset*). Sedangkan jika

---

<sup>64</sup> Wiroso, *op.cit.*, h. 122.

<sup>65</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.*, *op.cit.*, h. 191.

<sup>66</sup> Helwin Yunus, *Karyawan Pinsi Pemasaran Bank RiauKepri Cabang Sayariah*, Wawancara, Pekanbaru, 17 Januari 2013.

berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagiannya adalah laba neto (*net profit*), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.<sup>67</sup>

Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 11 di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembiayaan mudharabah diatur tentang prinsip distribusi bagi hasil, yang menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan metode *gross profit margin* (laba bruto) dan *profit sharing* (laba neto) bukan dengan sistem *revenue sharing*. Karena dengan menggunakan metode *gross profit margin* (laba bruto) dan *profit sharing* (laba bruto) tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan metode ini, pendapatan yang dibagihasilkan benar-benar hasil usaha yang telah dikurangi oleh biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah dalam menjalankan usahanya. Selain itu, *profit sharing* (laba neto) lebih sesuai sebagai metode bagi hasil dilihat dengan kacamata Ekonomi Islam.

Namun demikian dari hasil penelitian penulis pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dalam prakteknya mekanisme perhitungan bagi hasil yang digunakan adalah *revenue sharing*. Alasannya jika memakai *profit sharing* risikonya tinggi, dan adanya pembukuan ganda dari pihak penerima dana, akibatnya dengan metode *revenue sharing* pihak yang selalu

---

<sup>67</sup> PSAK No 105, *op.cit.* h. 3.



diuntungkan adalah pemilik dana dalam hal ini Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru.

Permasalahan pemilihan metode *revenue sharing* atau metode *profit sharing* sebenarnya merupakan permasalahan yang khas pada produk dengan akad mudharabah. Masalah ini timbul ketika bank syariah sebagai *shahibul maal* harus menghadapi resiko yang cukup tinggi, karena penyaluran dana kepada masyarakat secara hukumnya pemilik dana tidak diperkenankan turut campur dalam kegiatan sehari-sehari usaha pengelola dana atau *mudharib*. Apabila *revenue sharing* yang dipilih maka jumlah yang harus dibagi dihasilkan lebih banyak, tetapi bagi *mudharib* (pengelola dana) menjadi berkurang karena semua ongkos yang telah dipergunakan untuk menjalankan usaha menjadi tanggungannya. Dengan demikian pihak yang diuntungkan adalah *shaibul maal* (pemilik dana). Sedangkan jika menggunakan metode *profit sharing* dapat menguntungkan kedua belah pihak, namun jika *mudharib* (pengelola dana) tidak amanah dan apabila biaya-biaya usaha tidak dikendalikan maka akan merugikan *shahibul maal* (pemilik dana) dalam hal ini Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru.

Meskipun distribusi bagi hasil yang dijalankan pihak Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru ini belum sesuai dengan PSAK No 105 namun sudah mengacu kepada PSAK No 59, hal ini dilakukan oleh pihak

Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dikarenakan masih sulitnya untuk menerapkan distribusi bagi hasil yang dianjurkan oleh PSAK No 105, karna didalam melakukan distribusi bagi hasil yang mengikuti metode *gross profit margin* (laba bruto) dan *profit sharing* (laba neto) harus didukung dengan kesiapan bank dan juga nasabah, bank RiauKepri cabang syariah belum menerapkan PSAK No 105 karena sulitnya mengenali nasabah, sulitnya menilai usaha yang prospek dan Nasabah yang pantas..

Dan jika PSAK No 105 ini tetap dipaksakan kepada lembaga keuangan syariah maka akan ada salah satu pihak yang akan dirugikan. dan juga ketidak siapan masyarakat dalam mentaati akad juga menjadi penyebab dalam menggunakan metode distribusi bagi hasil pada PSAK No 105, dimana masyarakat masih rendah ketaatannya kepada akad yang dibuat antara kedua belah pihak.

## 2) Pengakuan dan Pengukuran

Dalam ketentuan PSAK No.105 paragraf 12 tentang investasi mudharabah boleh berbentuk Kas dan Aset non Kas, hal ini tertuang sebagai berikut:

Dalam *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>*Ibid.* h. 4.

Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 12 di atas, dapat dipahami bahwa Ketentuan ini mengatur pemilik usaha dibolehkan memberikan investasi dalam bentuk kas atau non kas, namun pada akhirnya berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru hanya memberikan investasi dalam bentuk kas.

Dalam ketentuan PSAK No. 105 paragraf 22 tentang penghasilan usaha disebutkan bahwa:

Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usahadari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.<sup>69</sup>

Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 22 di atas, dapat dipahami bahwa penghasilan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha, melainkan harus berdasarkan pendapatan riil hasil usaha.

Namun, Pada faktanya Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru menerapkan sistem proyeksi pendapatan yang akan dibagihasilkan dengan nasabah, Dari pemaparan di atas maka Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru tidak mengikuti ketentuan yang ada pada PSAK No 105 dalam menentukan pengukuran pendapatan melainkan masih mengacu kepada PSAK No 59. Hal ini jelas menjadi dilema bagi pihak Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dalam hal menjalankan PSAK No 105, karna disatu sisi lembaga keuangan dituntut untuk selalu mematuhi keputusan

---

<sup>69</sup> *Ibid.* h. 5.

Dewan Syariah Nasional sementara disisi lain kondisi masyarakat belum siap dengan hal yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

### 3) Akuntansi untuk Pengelola Dana

Dalam ketentuan PSAK No. 105 paragraf 30 tentang Akuntansi untuk Pengelola Dana hal ini disebutkan bahwa:

Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.<sup>70</sup>

Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 30 di atas, dapat dipahami bahwa kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Hal ini juga telah diikuti oleh Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru.

### 4) Penyajian

Dalam ketentuan PSAK No. 105 paragraf 36 tentang Akuntansi untuk Pengelola Dana hal ini disebutkan bahwa:

Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.<sup>71</sup>

Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 36 di atas, dapat dipahami bahwa Salah satu butir dalam ketentuan ini adalah pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Dalam hal ini berarti sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No 105 paragraf 36 ini karena Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru mencatat besarnya investasi mereka sesuai dengan nominal yang diberikan oleh nasabah.

---

<sup>70</sup> *Ibid.* h. 6.

<sup>71</sup> *Ibid.* h. 8.

### 5) Pengungkapan

Dalam ketentuan PSAK No. 105 paragraf 38 tentang Pengungkapan disebutkan bahwa:

Pemilik dana mengungkapkan hal hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi terbatas pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
- b. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
- c. Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; dan.
- d. Prngungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Keuangan Syariah.<sup>72</sup>

Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 38 di atas, dapat dipahami bahwa, Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya, dan ketentuan jenis usaha harus diketahui dengan jelas. Misalkan usaha yang dijalankan harus sesuai dengan ketentuan akad dan ini harus mendapat kontrol dari pihak lembaga keuangan syariah, tujuannya agar tidak terjadi penyelewengan dalam menggunakan modal yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah, dalam hal ini Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru. Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan. Dalam akad *mudharabah* maka segala kerugian yang terjadi dalam menjalankan usaha harus tercatat dengan rinci dan detail.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

Butir *pertama*, mengenai kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain, menurut penulis Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK No 105 karna dalam akad pembiayaan *mudharabah* semua poin itu telah tercantum. Misalkan tentang jumlah modal tercantum dalam pasal I ayat 1, pembagian hasil usaha tercantum dalam pasal II tentang nisbah bagi hasil, aktivitas usaha tercantum dalam pasal I ayat 2 dan ketentuan lainnya.

Butir *kedua*, mengenai penyisihan kerugian investasi *mudharabah* pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru yang menanggung kerugian dalam pengelolaan pembiayaan *mudharabah* akan dilihat terlebih dahulu penyebab kerugiannya. Jika disebabkan oleh faktor alam (*force majeure*) seperti terjadinya kebakaran pada usaha sehingga mengakibatkan kerugian maka Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru akan menanggung kerugian tersebut, hal ini juga telah sesuai dengan PSAK No 105 paragraf 10. Namun jika kerugian disebabkan karena kelalaian para pengelola atau *mudharib* maka kerugian akan ditanggung oleh pihak *mudharib*. Untuk lebih memudahkan penjelasannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Ringkasan Perbandingan Kesesuaian Metode Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan ketentuan PSAK No 105.

No	Coding	PSAK No 105	Implementasi pada Bank RiauKepri Cabang Syariah pekanbaru	Analisis
1	Pola Bagi Hasil	Dalam PSAK No 105 paragraf 11 dasar prinsip bagi hasil adalah laba bruto ( <i>gross profit</i> ) dan laba neto ( <i>profit sharing</i> ) bukan total pendapatan usaha ( <i>omset</i> )	Pola bagi hasil yang ditetapkan Bank RiauKepri cabang Syariah Pekanbaru dalam melakukan pembagian hasil usahanya yaitu menggunakan <i>revenue sharing</i> , hal ini bertentangan dengan PSAK No 105 paragraf 11	Tidak sesuai
2	Pengukuran Nisbah	Dalam PSAK No 105 paragraf 22 Pengakuan penghasilan dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana, tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha	Penentuan penghasilan ditentukan dengan menggunakan metode proyeksi usaha, hal ini bertentangan dengan PSAK No 105 paragraf 22 yaitu berdasarkan pendapatan ril usaha.	Tidak sesuai
3	Kerugian	PSAK No 105 paragraf 18 menyebutkan Kerugian akibat kelalaian nasabah menjadi tanggung jawab nasabah	Kerugian akibat nasabah menjadi tanggung jawabnya dan nasabah wajib menyelesaikan angsuran pokoknya, kecuali kerugian yang terjadi akibat <i>force majeure</i> .	Sudah Sesuai
4	Penyajian	PSAK No 105 paragraf 36 menyebutkan Penyajian nilai <i>mudharabah</i> ditulis sesuai dana yang diberikan.	Penyajian mengenai modal yang diberikan sesuai dengan dana yang diberikan kepada nasabah/ <i>mudharib</i>	Sudah Sesuai
5	Pengelolaan dana	a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i> , dan lain-lain. PSAK No 105 paragraf 38 butir A b. rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. PSAK No 105 paragraf 38 butir B c. penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> selama periode berjalan. PSAK No 105 paragraf 38 butir C	a. Kesepakatan telah mencantumkan porsi dana, aktivitas usaha, nisbah, proyeksi, dan lain-lain b. Rincian investasi berdasarkan peruntukannya c. Melakukan penyisihan kerugian	Sudah Sesuai

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari lima ketentuan umum PSAK 105 tentang pembiayaan mudharabah, di mana terdapat dua point yang tidak sesuai dan belum diterapkan pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru, yaitu 1) pola bagi hasil, 2) pengakuan dan pengukuran nisbah. Sementara tiga dari lima point penting yang diatur sudah sesuai dan diterapkan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada distribusi bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Metode bagi hasil yang digunakan pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru belum sesuai dengan PSAK No 105. Karena Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru menggunakan metode *revenue sharing* dalam pembiayaan *mudharabah*nya. Sementara PSAK No 105 paragraf 11 menyarankan bahwa pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan metode *profit sharing* dan *gross profit margin* sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Meski tidak sesuai dengan PSAK No 105 dalam distribusi bagi hasil yang dilakukan oleh Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru, namun sudah mengacu kepada PSAK No 59, hal ini dilakukan karena merubah dari sistem *revenue sharing* ke sistem *gross profit margin* bukanlah suatu hal yang mudah, dikarenakan kondisi sosial masyarakat saat ini yang masih belum siap dengan cara seperti ini. Sehingga perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat secara terus menerus.
2. Pada penerapannya, guna untuk mengetahui hasil usaha (pendapatan) yang akan dibagikan, Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru menerapkan metode proyeksi hasil usaha, yaitu memperkirakan pendapatan

*mudharib*/nasabah berdasarkan pengalaman mereka dalam menghasilkan keuntungan usaha, tanpa menghitungnya dari pendapatan ril yang diperoleh nasabah, hal ini jelas bertolak belakang dengan ketentuan PSAK No 105 paragraf 11 tentang dasar pembagian hasil usaha sebaiknya berdasarkan keuntungan ril bukan dengan sistem proyeksi usaha.

Jika sistem distribusi bagi hasil *revenue sharing* yang ada pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru saat ini tidak diubah dengan menggunakan ketentuan PSAK No 105 maka praktek yang dilakukan jelas akan bertentangan dengan Dewan Syariah Nasional yang telah membuat undang-undang yang tertuang dalam bentuk PSAK No 105.

## **B. SARAN-SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Metode bagi hasil pembiayaan *mudharabah* Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru sebaiknya menggunakan metode *gross profit margin* dan *profit sharing* sebagaimana tercantum dalam PSAK No 105 paragraf 11, Karena dengan menggunakan metode ini sangatlah adil bagi kedua belah pihak. Dengan metode ini, pendapatan yang dibagihasilkan benar-benar hasil usaha yang telah dikurangi oleh biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah dalam menjalankan usahanya. Selain itu, *profit sharing* lebih sesuai sebagai metode bagi hasil dilihat dengan kacamata Ekonomi Islam.
2. Perlu ada usaha agar sistem proyeksi yang digunakan dalam menentukan hasil usaha yang akan dibagihasilkan dirubah dengan mendasarkan pada

keuntungan riil hasil usaha *mudharib* atau nasabah, yaitu dengan adanya pembinaan moral tentang bermuamalah dan administrasi keuangan hasil usaha pada *mudharib*. Karena sistem proyeksi yang digunakan saat ini masih lemah tingkat kesyariahannya.

3. Sebaiknya pihak Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dalam menentukan metode distribusi bagi usaha mengacu kepada PSAK No 105 dan meninggalkan sistem *revenue sharing* yang ada pada PSAK No 59, karena terhitung efektif 1 Januari 2008 PSAK No 59 sudah tidak diberlakukan, sekaligus digantikan dan dihapuskan serta diganti dengan PSAK No 105.
4. Hukum, fatwa dan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang dibuat oleh DSN-MUI dalam bentuk PSAK hendaknya selalu dijadikan landasan, sehingga dalam melakukan operasionalnya tidak keluar dari hukum yang berlaku dan tetap berada dalam koridor Islam.
5. Hendaknya pihak manajemen Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru selalu melakukan pembekalan kepada seluruh kariawannya, agar kariawan yang menjalankan transaksi syariah memiliki pengetahuan yang dalam terkait ekonomi islam, sehingga bisa lebih menjiwai dan mengamalkan nilai-nilai islam ketika bertemu dengan nasabah dan juga agar para kariawan tidak mudah meninggalkan nilai-nilai syariah bila berhadapan dengan permasalahan di lapangan. Dan yang paling penting setiap praktisi ekonomi syariah harus mampu melakukan edukasi kepada masyarakat secara gradual agar realita yang rusak ini segera bisa berubah kearah yang lebih baik.

6. Semestinya porsi pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada bank syariah harus lebih banyak jika dibandingkan dengan yang lainnya Karena pada akad inilah karakteristik dasar dan roh dari perbankan syariah terbentuk. Sebab Perbankan syariah dengan sistem bagi hasil inilah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Mishri. Abdul Sami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Antonio, M. Syafi'I, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta, 1999.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Ekonomi Islam*, Hizbut Tahrir Indonesia, Jakarta, 2004.
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alvabet, Jakarta, 2000.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Putra, 2002.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke empat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-'Aliyy*, Diponegoro, Bandung, 2000.
- Diana, Yumanita, Ascarya, *Mencari Solusi Rendahya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia*. Bank Indonesia, Jakarta, 2002.
- Hasan. M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Karnaen A, Perwataatmadja & Antonio Syafi'i , *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992.
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*. Cetakan ke tiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Macmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syariah Teori kebijakan dan studi empiris di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010
- Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, PT Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, 1997.
- M. Ismail Yusanto dan M.Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Cetakan ke satu. Al-Azhar Press. Bogor, 2009.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.

-----, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2004.

-----, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, UPFE UMY, Yogyakarta, 2005.

Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, 2003.

PSAK No 59 dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 2000.

PSAK No 105 dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 2007.

Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.

Soemitra. Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*. Alfa Beta. Bandung, 1998.

-----, *Metode penelitian Bisnis (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif)*. Alfabeta. Bandung, 2008.

Sumiyanto, Ahmad, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah*. Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2005.

Tim pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta, 2001.

Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Grasindo, Jakarta, 2005.

**LAMPIRAN**

**Pertanyaan Wawancara Pada Kantor Bank RiauKepri Cabang Syariah  
Pekanbaru**

1. Macam-macam produk mudharabah yang ada di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru.
2. Angsuran dan pelunasan?
3. Cara menyikapi nasabah yang bermasalah?
4. Cara Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru menyikapi Jika terjadi force major terhadap usaha yang dibiayai?
5. Jangka waktu yang ditawarkan dalam pembiayaan mudharabah?
6. Jenis usaha yang sering di berikan pembiayaan pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru?
7. kriteria usaha yang di berikan pembiayaan seperti apa?
8. Bagaimana metode perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru?
9. Faktor apa yang mempengaruhi kebijakan Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dalam menentukan distribusi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah
  - a. Nisbah yang disepakati
  - b. Metode Pembagian Hasil Usahnya seperti apa?
  - c. Metode menentukan besarnya nisabah Pembagian Hasil Usaha?
10. Bagaimana Penerapan distribusi bagi hasil pembiayaan mudharabah di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dengan ketentuan PSAK No 105?



#### WAWANCARA:

1. Metode apakah yang diterapkan Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah?
2. Bagaimana menurut Bapak tentang tingkat resiko pembiayaan mudharabah pada Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru?
3. Berbentuk kas atau aset non kas investasi yang disalurkan dalam pembiayaan mudharabah oleh Bank RiauKepri Cabang Syariah Pekanbaru?